

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan sampah merupakan persoalan bagi masyarakat secara keseluruhan. Hal itu dikarenakan setiap individu manusia mempunyai andil dalam terciptanya sampah yang ada di lingkungan sekitar. Oleh karena itu setiap individu manusia sebenarnya mempunyai tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkannya, sehingga sampah yang dihasilkan tidak berdampak buruk untuk kehidupan masyarakat secara luas maupun lingkungan hidup. Sampah mempunyai berbagai bahan yang beracun, misalnya insektisida, logam berat, karbon monoksida dan lain sebagainya. Permasalahan sampah yang terjadi tidak dapat diselesaikan dengan hanya membuat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau tempat pembuangan sampah yang sejenisnya, akan tetapi permasalahan sampah harus diatasi dengan pendekatan dari sumber sampahnya yaitu masyarakat, dengan melakukan upaya penyadaran setiap individu masyarakat untuk mengelola sampah dari lingkungan terkecil, misalnya dalam lingkup keluarga sehingga dapat meminimalisir sampah yang terbangun ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Sampah juga merupakan salah satu dari berbagai permasalahan sosial, masalah sampah ini semakin berkembang khususnya di daerah yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Permasalahan sampah ditimbulkan oleh berbagai faktor misalnya, adanya limbah yang dihasilkan dari aktivitas masyarakat, kurangnya tempat sampah untuk tempat pembuangan

limbah, kepadatan penduduk, dan perilaku konsumtif masyarakat. Faktor yang menyebabkan permasalahan sampah khususnya di kawasan padat penduduk yaitu masih banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa sampah bukanlah masalah yang serius, sehingga masyarakat tersebut tidak mempedulikan keberadaan sampah (Simatupang, 2022).

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dengan jumlah kepadatan menurut Badan Pusat Statistika Yogyakarta berjumlah 3,9 juta jiwa pada tahun 2021 dengan jumlah presentase peningkatan jumlah penduduk 1,15%. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu wilayah yang mengalami persoalan sampah cukup parah, dengan penampungan sampah yang sangat terbatas yaitu difokuskan di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, yang terletak di Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

Menurut Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral di DIY, Sistem pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman secara bersama-sama memanfaatkan tempat pembuangan akhir TPST Piyungan sebagai tempat pembuangan sampah akhir di wilayah mereka. TPST Piyungan beroperasi sejak Tahun 1966 hingga sekarang. Menurut keterangan dari Balai Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Yogyakarta masa operasi TPST Piyungan berdasarkan dokumen lingkungan yang terdapat di TPST Piyungan berakhir pada tahun 2014. Upaya pengelolaan sampah yang dilakukan di TPST Piyungan hanya

sejauh penimbunan sampah dan sudah melebihi kapasitas yang tersedia. Jumlah sampah yang masuk dalam catatan UPT pengelola TPST Piyungan sekitar 450 ton/hari pada saat pandemi, dan mengalami peningkatan mencapai 630-650 ton/hari (Widhiananto, 2016).

Metode yang digunakan oleh pengelola Tempat Pembuangan Sampah Terpadu TPST Piyungan yaitu metode *Sanitary Landfil Method*, yaitu sistem pembuangan sampah dengan cara menimbun lapisan sampah dengan tanah dan dipadatkan sehingga sampah tidak berada di alam terbuka, akan tetapi dalam metode *Sanitary Landfil Method* ini tidak dapat menyingkirkan seluruh limbah, dan pengelolaan sampah menghasilkan residu yang seharusnya ditangani untuk dikelola lebih lanjut. Penggunaan metode *Sanitary Landfil Method* dinilai masih kurang efektif dikarenakan sampah yang terkumpul tidak akan hilang dan cenderung menumpuk tetapi tidak diimbangi dengan luas lahan yang bertambah sehingga seiring berjalannya waktu akan membuat Tempat Pembuangan Sampah Terpadu TPST Piyungan akan penuh. Volume sampah yang tiap hari akan meningkat seiring dengan meningkatkan jumlah masyarakat dan kebutuhan masyarakat yang dapat menghasilkan sampah akan membuat TPST Piyungan mengalami ledakan sampah yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan sekitar, seperti longsor sampah maupun pencemaran udara di sekitar TPST Piyungan.

Menurut Ramadhan et al., (2018) air lindi TPST Piyungan sudah mencemari air dalam tanah disekitar TPST yang mengakibatkan air disekitarnya tidak layak untuk dikonsumsi karena dapat berdampak buruk

untuk Kesehatan. Dalam menangani pengelolaan sampah di TPST Piyungan, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Sekretariat Bersama Yogyakarta, Sleman, dan Bantul atau yang disingkat menjadi Sekber Kartamantul. Sekber Kartamantul merupakan satuan kerja yang mempunyai tugas untuk mengawasi pengelolaan sampah di tingkat provinsi untuk bekerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup BLH di kabupaten/kota.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga mengamanatkan diperlukannya perubahan pandangan dalam mengelola masalah sampah yaitu dari yang awalnya sampah hanya kumpul-angkut-buang, menjadi pengelolaan sampah yang berlandaskan pada pengurangan sampah dan pengelolaan sampah.

Menurut Isworo, (2018) Pemahaman yang keliru terhadap sampah akan berdampak pada pengelolaan sampah itu sendiri. Masyarakat yang mempunyai anggapan bahwa sampah itu kotor, bau, dan dapat mengancam kesehatan menjadi momok bagi sebagian orang, sehingga sampah cenderung di jauhi oleh masyarakat. Akan tetapi sebaliknya, jika masyarakat berpikir benar mengenai apa itu sampah, maka masyarakat juga akan benar dalam menangani permasalahan sampah. Perubahan pandangan untuk pengelolaan sampah menjadikan sampah yang sering dipandang sebelah mata karena tidak mempunyai manfaat, kini berubah menjadi sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan bahkan menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi.

Environmental Governance mempunyai konsep tentang bagaimana kita dapat berinteraksi dalam lingkungan. Dalam *Environmental Governance* mempunyai fokus pada tujuan untuk mengelola dan memahami hubungan timbal balik antara sistem sosial dan ekosistem. Menurut Mustaghfiroh et al., (2020) terdapat beberapa komponen dalam *Environmental Governance*, yaitu *Public Governance* yaitu Lembaga pemerintahan, *Corporate Governance* yaitu pihak swasta, dan *Civil Society* atau masyarakat sipil.

Untuk melakukan pengelolaan sampah khususnya Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri kurang maksimal, dapat dilihat dengan semakin menumpuknya volume sampah yang berada di TPST Piyungan, sangat disayangkan Yogyakarta yang dikenal dengan Kota Istimewa dan Kota dengan jumlah wisatawan yang tinggi masih belum maksimal untuk mengatasi pengelolaan sampah. Oleh karena itu untuk menghadapi permasalahan sampah yang semakin mengkhawatirkan ini membutuhkan peran aktif dari masyarakat, peran aktif masyarakat. Pengelolaan sampah khususnya sampah rumah tangga membutuhkan keterlibatan masyarakat supaya pemerintah tidak semakin berat untuk menanggung permasalahan sampah.

Bertambahnya jumlah partisipasi masyarakat dapat dicapai jika dalam lingkup yang paling kecil, yaitu keluarga khususnya orang tua dapat memilah sampah organik dan anorganik, hal itu dapat menjadikan bahan pembelajaran untuk anak agar dapat meniru perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya karena perilaku yang ditanamkan sejak kecil akan menjadi sebuah kebiasaan sehingga dapat meningkatkan partisipasi dari masyarakat. Peran aktif

masyarakat untuk mengelola sampah ini dapat dilakukan dari lingkup kecil seperti keluarga sampai lingkup yang lebih besar seperti komunitas. Banyaknya komunitas peduli lingkungan yang muncul dikarenakan adanya rasa prihatin terhadap keselamatan lingkungan di masa yang akan datang.

Dengan membentuk sebuah komunitas atau perkumpulan masyarakat tentunya akan lebih mudah untuk mencapai tujuan, dibandingkan dengan lingkup yang lebih kecil. Kampanye yang dilakukan oleh komunitas dalam upaya untuk menyadarkan masyarakat bukan sesuatu yang sederhana. Mereka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat mempengaruhi dan menciptakan masyarakat yang berkarakter untuk peduli terhadap lingkungan, dalam hal ini adalah sampah. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Pasal 70 ayat 1 yang berbunyi: masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Meskipun sudah mulai banyak komunitas yang peduli dengan persoalan sampah akan tetapi, peran masyarakat dibutuhkan karena jumlah sampah yang ditangani oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta hanya sebesar 893,53 ton/hari. Hal ini tentu saja masih kurang mengingat jumlah sampah yang ditimbulkan menurut Aplikasi DATAKU Daerah Istimewa Yogyakarta sekitar 1.133,94 ton/hari.

Gambar 1. 1 Keterpaduan 5K dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah



Sumber: Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2022

Gerakan Sedekah Sampah yang berlokasi di Dusun Brajan, Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Masyarakat memulai Gerakan untuk mengelola sampah terutama sampah rumah tangga dari lingkup yang kecil. Komunitas ini mengajak masyarakat untuk memulai melakukan pengelolaan sampah dengan kolektif dengan sistem sedekah, dengan begitu masyarakat yang menyetorkan sampah tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun, dan memungkinkan partisipasi dari semua kalangan masyarakat. Kampanye yang dilakukan oleh komunitas dalam upaya untuk

menyadarkan masyarakat bukan sesuatu yang sederhana. Mereka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat mempengaruhi dan menciptakan masyarakat yang berkarakter untuk peduli terhadap lingkungan, dalam hal ini adalah sampah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas mengenai permasalahan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta dan peran masyarakat untuk mengatasi permasalahan akumulasi sampah, maka diperoleh rumusan masalah yaitu: Bagaimana inovasi Gerakan Sedekah Sampah Kampung Brajan dalam *Environmental Governance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui inovasi Gerakan Sedekah Sampah Kampung Brajan dalam *Environmental Governance*. Penelitian ini mempunyai fokus studi kasus di Gerakan Sedekah Sampah Kampung Brajan sebagai komunitas yang mempunyai fokus kepedulian terhadap pengelolaan sampah, khususnya sampah rumah tangga.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan perkembangan ilmu pemerintahan, khususnya yang mempunyai hubungan dengan *Environmental Governance*. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi atau rujukan untuk penelitian berikutnya

1.4.2 Manfaat Praktis

a) Untuk Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi individu atau kelompok masyarakat dalam rangka mengatasi permasalahan sampah. Selain itu, dapat menjadi bahan evaluasi oleh individu/kelompok masyarakat dalam rangka memperbaiki pengelolaan sampah yang dinilai masih kurang maksimal.

b) Untuk Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengatasi permasalahan sampah di TPST Piyungan, selain itu dapat menjadi bahan acuan untuk terus memperbaiki pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
1	(Mulasari et al., 2016)	Analisis Situasi Permasalahan Sampah Kota Yogyakarta dan Kebijakan Penanggulangannya	Terdapat tiga sumber permasalahan sampah di Yogyakarta yang semakin hari semakin parah. Permasalahn pertama terletak di bagian hilir yaitu terus meningkatnya volume sampah dari masyarakat, permasalahan kedua terletak pada bagian proses, dalam hal ini yang mempunyai tanggung jawab yaitu BLH Kota Yogyakarta yang mempunyai keterbatasan sumber daya dan anggaran untuk mengelola permasalahan sampah, dan permasalahan ketiga terletak pada bagian hulu, yaitu pada pengelola sampah akhir yang letaknya (TPST Piyunga) yang dinilai belum maksimal dalam mengelola sampah.
2	(Rahayu, 2019)	Analisis Strategi Pengelolaan Sampah di	Bertambahnya populasi masyarakat dan volume sampah yang dihasilkan dan terbatasnya tempat pembuangan sampah di Kota Yogyakarta membuat pemerintah

		<p>TPST Piyungan Kabupaten Bantul dalam Upaya Mengurangi Banjir Sampah (Studi Kasus di TPST Piyungan, Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, Yogyakarta)</p>	<p>harus mengeluarkan dana sekitar 2 miliar setiap tahunnya untuk menangani masalah sampah. Penanganan yang dilakukan di TPST Piyungan menggunakan metode <i>Sanitary Landfill Method</i> yaitu metode menimbun sampah menggunakan lapisan tanah di atasnya dan terus berulang, metode ini dianggap kurang maksimal karena melakukan penimbunan sampah menggunakan tanah tidak membuat sampah tersebut menghilang.</p>
3	(Simatupang, 2022)	<p>Peran Komunitas Cibinong</p>	<p>Dalam mengatasi masalah sampah yang berada di Kecamatan Cibinong, Cibinong Society mempunyai empat peran. Yang</p>

		<p><i>Society</i> dalam Mengatasi Masalah Sampah</p>	<p>pertama berperan sebagai pelopor terbentuknya komunitas Cibinong Society, yang kedua mempunyai untuk mensosialisasikan tentang lingkungan yang sehat, yang ketiga mempunyai peran untuk memberikan pelatihan keterampilan mengenai pengelolaan sampah, dan pemasaran secara online kepada masyarakat, dan yang terakhir peran dari Cibinong Society yaitu membantu masyarakat untuk mengidentifikasi masalah sampah yang terjadi di Kecamatan Cibinong.</p>
4	(Suryani, 2014)	<p>Peran Bank Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang)</p>	<p>Bank Sampah menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi peningkatan masalah sampah yang semakin tidak terkendali. Bank Sampah mempunyai dampak positif untuk lingkungan karena mengumpulkan sampah yang mempunyai nilai ekonomi, selain itu dalam proses pengelolaannya, bank sampah mempunyai mekanisme</p>

			relasi dan jaringan sosial yang dapat menjadikan sampah mempunyai nilai ekonomis.
5	(Sukmono et al., 2019)	Pemberdayaa Masyarakat Kelompok Gerakan Shodaqoh Sampah dengan <i>Ingrated Social Marketing Communcati on.</i>	Dalam mengelola komunikasi pemasarran sosial, Gerakan Shadaqoh Sampah telah mampu untuk mengelola media sosial, baik secara menajemen media ataupun konten yang diberikan kepada masyarakat, dengan perkembangan teknologi yang semakin meningkat, maka program perberdayaan lingkungan oleh Gerakan Shadaqoh Sampah dapat semakin dikenal oleh masyarakat luas.
6	(Suyanto, 2018)	Membangun Kesadaran Sodaqoh Sampah Sebagai Model Pemberdayaa n Masyarakat	Proses pemberdayaan masyarakat yang partisipatif dilakukan dengan melibatkan masyarakat untuk mengenali kondisi sampah dan ancaman sampah di lingkungan sekitar. Selanjutnya untuk dapat untuk melakukan aksi penyadaran digunakan hari-hari besar seperti Hari Kartini dengan konsep jalan sehat

			<p>sehingga dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat. Masyarakat Barongan juga diberikan pelatihan terhadap sampah organik sehingga mempunyai kemampuan untuk mengelola sampah secara mandiri.</p>
7	(Affandy et al., 2015)	Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Komprehensif Menuju <i>Zero Waste</i>	<p>Terdapat beberapa Indikator keberhasilan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah komprehensif, indikator tersebut antara lain yaitu, aspek perilaku masyarakat, tingkat pemahaman masyarakat, Teknik operasional dan kelestarian lingkungan. Dengan semakin berkurangnya volume sampah, menunjukkan bahwa masyarakat sudah mempunyai kepedulian untuk mengelola sampah menuju <i>zero waste</i> dengan menggunakan konsep 3R (<i>Recycle, Reuse, Reduce</i>).</p>
8	(Armadi, 2021)	Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan	<p>Peran masyarakat dalam mengelola sampah yang dalam penelitian ini berada di Kota Denpasar dinilai cukup efektif dengan menggunakan metode</p>

		<p>Sampah Sebagai Kunci Keberhasilan dalam Mengelola Sampah</p>	<p>pengomposan dan 3R (<i>Recycle, Reuse, Reduce</i>). Akan tetapi dalam upaya untuk mengurangi gas rumah kaca, peran masyarakat masih harus ditingkatkan dengan menggunakan unit percontohan pengomposan.</p>
9	(Hidayat,2019)	<p>Peran Komunitas (Berbasis Masyarakat) dalam Pengelolaan Sampah di Dusun Serut Kecamatan Palbapang Bantul D.I Yogyakarta</p>	<p>Terdapat lima peran yang dilakukan oleh Masyarakat di Dusun Serut, Palbapang, Bantul dalam upaya pengelolaan sampah. Yang pertama sebagai wadah sampah yaitu masyarakat mempunyai satu wadah untuk menampung sampah yang dihasilkannya, yang kedua sebagai pengumpul sampah, yaitu masyarakat mempunyai dua sistem pengumpulan sampah, yang ketiga yaitu pengolahan sampah, yaitu dengan melakukan daur ulang sampah sisa makanan menjadi pupuk melalui pengomposan komposter, yang keempat yaitu pemanfaatan sampah dengan cara memanfaatkan sampah plastik sebagai bahan baku kerajinan</p>

			<p>kreatif, dan yang kelima yaitu penerapan <i>zero waste</i> dengan cara mengurangi penggunaan barang yang dapat menghasilkan sampah dan pengoperasian bank sampah.</p>
10	(Paksi & Prasetyoni ngsih, 2019)	<p>Inisiasi Gerakan Shodaqoh Sampah Bagi Masyarakat Desa Trimurti, Bantul</p>	<p>Adanya Gerakan Shodaqoh Sampah di Desa Trimurti mendapatkan antusias dari masyarakat, masyarakat yang mempunyai sikap apatis terhadap sampah di awal komunitas ini dibentuk, kini menjadi lebih peduli terhadap persoalan sampah. Partisipasi masyarakat dilakukan mulai dari sosialisasi, penyuluhan, dan aksi dalam shodaqoh smapah. Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat bersifat suka rela tanpa ada paksaan dan mempunyai komitmen untuk melanjutkan kegiatan shodaqoh sampah.</p>

Dari beberapa penelitian terdahulu yang dipaparkan diatas, sebagian besar mempunyai fokus pada penanganan sampah dan juga peran masyarakat dalam mengelola sampah, akan tetapi dari penelitian terdahulu tersebut belum terdapat penelitian yang mempunyai fokus tentang “*Civil*

Society Gerakan Sedekah Sampah dalam *Environmental Governance*” maka dari itu penelitian ini merupakan penelitian baru. Perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu membahas dan menganalisa lebih dalam mengapa Gerakan Sedekah Sampah yang merupakan kelompok masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan lingkungan menjadi salah satu inovasi dalam tata Kelola lingkungan. Berdasarkan penelitian diatas, penelitian ini menjadi menarik karena penelitian ini mempunyai fokus pada bagaimana Gerakan *Civil Society* dalam inovasi *Environmental Governance* dengan studi kasus Gerakan Sedekah Sampah Kampung Brajan.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Civil Society

Civil Society berasal dari dua kata dalam bahasa latin, *civitas dei* yang mempunyai arti kota dan *society* yang mempunyai arti masyarakat. Dari penggabungan dua kata tersebut sehingga tercipta kata *civitation* yang mempunyai arti peradaban. Dari penjelasan itu, *Civil Society* mempunyai arti sebagai komunitas atau kelompok masyarakat kota yang telah mempunyai peradaban yang maju (Mahasin, 1995).

Civil Society berasal dari proses sejarah masyarakat barat dimana perkembangannya dapat terlihat mulai dari Cicero (106-43 SM) sampai Aristoteles (384-322 SM). Istilah *Civil Society* pertama kali digunakan oleh Cicero dalam filsafat politiknya, disinilah *Civil Society* mempunyai kemiripan dengan negara (*state*), yaitu sebuah komunitas yang mendominasi komunitas lainnya.

Lain halnya dengan Aristoteles yang menggunakan istilah *koininie politike*, yaitu suatu komunitas politik dimana masyarakat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi konsep dari *Civil Society* mengalami perubahan makna, Negara dan *Civil Society* kemudian dipahami sebagai dua entitas yang berbeda sejalan dengan proses pembentukan sosial dan perubahan struktur politik di Eropa (Darmawan, 2016).

Menurut AS Hikam (dalam Hamid,2019) sebagaimana yang dikonsepsikan oleh pemikirannya *Civil Society* mempunyai ciri khusus yaitu:

1. Adanya kemandirian yang tinggi dari anggotanya dalam masyarakat.
2. Adanya ruang public bebas sebagai tempat terlibat politik dan aktif dari warga negara untuk kepentingan publik.
3. Adanya kemampuan untuk membatasi kekuasaan suatu negara agar tidak otoriter atau adanya intervensi.

Definisi lain dari *Civil Society* yaitu sebagai tempat interaksi sosial yang mencakup semua kelompok sosial yang paling akrab (khususnya keluarga), asosiasi (yang bersifat sukarela), Gerakan kemasyarakatan, dan wadah komunikasi publik yang lain yang diciptakan dengan bentuk pengaturan dan mobilisasi diri secara independent (Cohen dan Arato, 1992).

Civil Society oleh Larry Diamond merupakan bidang kehidupan sosial yang terorganisir yang bersifat sukarela, menghasilkan diri, sebagian besar otonomo atau mandiri dari entitas negara dan mempunyai tatanan

hukum atau aturan bersama. Dalam pengertian ini *civil society* melibatkan warga untuk bertindak secara kolektif dalam ruang publik untuk menunjukkan minat, semangat, bertukar informasi, mencapai tujuan bersama dan membuat tuntutan pada negara (Argenti, 2017).

Sementara itu Cristensson dan Robinson (dalam Oktavianus, 2016) mengartikan komunitas merupakan orang-orang yang di daerah dalam satu geografis dan berkomunikasi antara satu dengan yang lain dan mempunyai ikatan antar individu yang tinggal di daerah tempat tinggalnya. *Civil Society Organization* merupakan semua organisasi, kelompok, atau komunitas yang berada di luar sektor negara. Terdapat beberapa kategori mengenai *Civil Society Organization*, yaitu;

1. Kultural, yaitu organisasi, kelompok, atau komunitas yang mempertahankan hak, nilai keyakinan, dan symbol kolektif.
2. Ekonomis, yaitu organisasi, kelompok, atau komunitas produktif dan komersial.
3. Kepentingan, yaitu organisasi, kelompok, atau komunitas berupaya untuk memajukan dan mempertahankan kepentingan fungsional atau material untuk anggotanya.
4. Informatif dan edukatif, yaitu organisasi, kelompok, atau komunitas mempunyai gerak pada produksi pengetahuan ide berita dan informasi public.
5. Berorientasi pada isu, yaitu organisasi, kelompok, atau komunitas mempunyai Gerakan atas isu yang terjadi,

misalnya perlindungan lingkungan, hak-hak perempuan, kelompok adat atau yang lainnya.

6. Berkaitan dengan pembangunan, yaitu organisasi, kelompok, atau komunitas mengumpulkan sumber daya dan bakat anggotanya untuk memperbaiki kelembagaan, infrastruktur, dan kualitas kehidupan komunitas.
7. *Civil Oriented* yaitu berupaya untuk memperbaiki sistem politik dan membuatnya lebih demokratis. Seperti kelompok yang berfokus pada HAM, Pemantauan pemilu, dan lain sebagainya.
8. Mempunyai hubungan dengan aliran informasi atau ide yang mencakup kelompok untuk mengevaluasi dan mengkritik negara. Misalnya media masa, universitas, atau kelompok pemikir.

1.6.2 Environmental Governance

Adanya istilah *governance* bukan hanya sebatas arti yaitu pemerintahan sebagai suatu kegiatan, lebih dalam dari itu, istilah *governance* mengandung makna pengurusan, pengelolaan, pembinaan dan pengarahan. *United Nations Development Program (UNDP)* (dalam Setya,2016) menjelaskan:

“Governance is the exercise of economic, political, and administrative authority to manage a country’s affairs at all levels

and means by which state promote social cohesion, integration, and ensure the well being of their population”

(Kepemerintahan adalah pelaksana kewenangan pada bidang ekonomi, politik, administrative untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrument kebijakan negara untuk mendorong terwujudnya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat)

Pada era modern ini banyak dilakukan pembangunan yang mengesampingkan aspek kelestarian lingkungan. Maka dari itu untuk mengurangi potensi kerusakan lingkungan dan untuk mengimplementasikan prinsip *good governance* terkait perlindungan lingkungan hidup, dibentuklah suatu konsep dalam manajemen pengelolaan lingkungan hidup yaitu *environmental governance*. Penerapan prinsip *Good Environmental Governance* sangat berkaitan dengan *Good Governance* karena pengelolaan lingkungan hidup yang baik ditentukan dan dipengaruhi oleh tata pemerintahan yang pada bidang lingkungan hidup.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa salah satu urusan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yaitu pengendalian lingkungan hidup yang termasuk juga persoalan sampah. Dengan terciptanya *good governance*, maka setiap program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dapat terlaksana dengan

baik, salah satunya adalah tata Kelola lingkungan atau *Environmental Governance*.

Menurut Balbase (dalam Felantias,2014) terdapat tiga aspek dalam penerapan good environmental governance, yaitu state (negara), private sector (sektor swasta), dan civil society (masyarakat sipil). Tiga sektor adalah komponen penting dalam pembangunan berkelanjutan, dimana negara menciptakan suasana lingkungan politik dan hukum yang kondusif. Swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan untuk masyarakat. dan Masyarakat sipil memfasilitasi politik dan interaksi sosial dan mengatur partisipasi kelompok dalam sosial, politik, dan ekonomi.

Sedangkan menurut *world bank, Good Environmental Governance* yaitu:

“.. it necessary to achieve the sustainable use of resources and the protection of environmental quality. This objective requires a atransparent system of well-functioning environmental institutions, policies, and program that actively involve the public in their formulation and implementation.”

Hal ini menjelaskan bahwa *Good Environmental Governance* adalah sebuah upaya penting untuk mensukseskan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan melindungi kualitas lingkungan. Kegiatan tersebut membutuhkan transparansi sistem pada institusi lingkungan, kebijakan dan berbagai program yang melibatkan masyarakat dalam menentukan suatu kebijakan.

Menurut *United Nations Environment Program* (UNEP), *World Bank*, dan *World Resources Institute* terdapat tujuh elemen dalam *environmental governance*, yaitu:

1 Lembaga dan hukum.

Terkait dengan siapa yang membuat dan menjalankan peraturan dalam penggunaan sumber daya alam, hukuman saat melanggar aturan, dan siapa yang dapat memutuskan jika terdapat perselisihan.

2 Hak partisipasi dan perwakilan

Bagaimana publik mempengaruhi aturan terkait sumber daya alam dan siapa yang menggunakan sumber daya alam

3 Tingkat otoritas

Pada tingkat otoritas lokal, regional, nasional, atau internasional atas sumber daya alam berada

4 Akuntabilitas dan transparansi

Bagaimana pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam pada kebijakan yang dibuat, dan bagaimana proses pembuatan dan peninjauan kebijakan

5 Hak dan posisi properti

Siapa yang mempunyai dan mengawasi atas sumber daya alam

6 Aliran pasar dan keuangan

Berkaitan dengan bagaimana praktik keuangan, kebijakan ekonomi, dan perilaku pasar dapat berpengaruh pada wewenang sumber daya alam

7 Ilmu dan resiko

Berkaitan dengan keterlibatan ekologi dan ilmu sosial dalam kebijakan sumber daya alam digunakan untuk mengurangi dampak buruk bagi masyarakat atau ekosistem dan mengidentifikasi peluang baru.

Dalam penelitian ini menggunakan teori mengenai *environmental governance* milik (Bennett, 2018). Teori tersebut dapat digunakan karena dalam penelitian ini juga membahas mengenai desain, evaluasi, dan analisis *environmental governance* yang telah dilakukan oleh salah satu komunitas atau *civil society* yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan khususnya sampah. Menurut Bennett, (2018) terdapat beberapa elemen dalam tata kelola lingkungan, yaitu:

1. Efekif

Tata kelola lingkungan yang efektif dapat meliputi; arah, koordinasi, kapasitas, informasi, akuntabel, dan efisien.

- Arah dapat dilihat melalui ketepatan dalam artukulasi visi.

- koordinasi meliputi dalam organisasi untuk membantu membangun sistem aturan.
- kapasitas yang terdiri dari kemampuan untuk memimpin, menyelesaikan masalah dan memanfaatkan sumber daya.
- Informasi memberikan informasi dengan pengetahuan yang baik sehingga sehingga dapat menghasilkan hasil yang efektif.
- Akuntabel, rasa tanggung jawab membantu untuk mendapatkan tindakan efektif, transparansi dalam komunikasi untuk membantu membuat keputusan.
- Efisien, kemampuan untuk memaksimalkan sumber daya yang ada.

2. Berkeadilan

Tata kelola lingkungan melibatkan proses pengambilan keputusan yang inklusif, partisipasi, dan adil.

- Pengakuan, tata kelola yang adil dimulai dengan proses untuk saling mengakui dan menghormati perbedaan.
- Partisipasi, keterlibatan kelompok untuk penambilan keputusan.
- Adil, tata kelola yang adil terjaga ketika adanya kebijakan atau perlindungan kelompok.

- Aturan Hukum, adanya peraturan untuk perlindungan hak, persetujuan bebas, dan keadilan

3. Responsif

Tata kelola lingkungan dapat diadaptasi untuk perubahan sosial dan beragam konteks. Pengaturan tata kelola lingkungan yang responsif yaitu; pembelajaran, antisipasi, kemampuan beradaptasi, inovasi, dan fleksibilitas.

- Pembelajaran, merupakan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja tata kelola lingkungan.
- Antisipasi, pengetahuan kedepan untuk melakukan tindakan untuk menghindari dari kondisi yang sulit.
- Adaptif, diartikan sebagai peninjauan secara berkala kebijakan untuk diperbarui secara berkala.
- Inovasi, yaitu mendorong ide-ide baru untuk diterapkan dalam berbagai konteks.
- Fleksibel, yaitu membandingkan pengelolaan lingkungan dan realitas sosial yang beragam sehingga dapat melakukan penyesuaian.

4. Kuat

Tujuan terakhir dari tata kelola lingkungan yaitu menjadi kuat, artinya lembaga dapat bertahan dari waktu ke waktu, mempertahankan kinerja, dan mengatasi gangguan dan krisis.

- Sah, lembaga dipandu oleh visi kolektif dan diberikan legitimasi formal (misalnya melalui hukum atau kebijakan).
- Terhubung, hubungan positif yang dimiliki oleh lembaga untuk memfasilitasi kolaborasi, pengetahuan, dan pertukaran informasi.
- Bersarang, yaitu otoritas pengambilan keputusan, tanggung jawab dan tugas diserahkan kepada yang bertugas sesuai administratif. Tanggung jawab dan wewenang yang dilakukan perlu adanya pengawasan dan dukungan dari tingkat yang lebih tinggi.
- Polisentris, yaitu penyediaan keragaman komponen kelembagaan untuk menghindari keruntuhan organisasi dan mempunyai tujuan yang sama.

Menurut Balbase (dalam Peramesti,2017) menyebutkan beberapa prinsip mengenai *Good Environmental Governance* antara lain:

1. Aturan hukum (*the rule of law*)
2. Partisipasi dan Representasi (*Participation and representation*)
3. Akses terhadap informasi (*Acces to information*)
4. Transparansi dan akuntabilitas (*Transparency and accountability*)
5. Desentralisasi (*Desentralitation*)
6. Lembaga dan institusi (*Institution and agencies*)
7. Akses untuk memperoleh keadilan (*Acces to justice*)

Dalam pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan dengan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan yang mempunyai wawasan lingkungan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. *Environmental Governance* adalah bagian dari kebijakan pemerintah untuk mengelola lingkungan hidup demi terciptanya kelestarian lingkungan hidup.

1.7 Definisi Konseptual

1.7.1 Civil Societ

Civil society dapat diartikan sebagai kelompok sosial dalam masyarakat yang terdiri dari beberapa anggota atau individu yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuannya.

1.7.2 Environmental Governance

Environmental Governance dapat diartikan sebagai kepedulian pemerintah dalam sektor lingkungan hidup untuk menciptakan kelestarian lingkungan hidup. Kepedulian pemerintah mengenai kelestarian lingkungan hidup ini bisa diimplementasikan dengan adanya program atau peraturan untuk melestarikan lingkungan. Terciptanya *environmental govenance* merupakan bagian dari prinsip *good governance*.

1.8 Definisi Operasional

Untuk mengetahui Gerakan Sedekah Sampah sebagai dalam Inovasi *Environmental Governance*, maka peneliti menggunakan *teori environmental governance* menurut (Bennett, 2018)

Tabel 1. 2 Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Parameter
	Efektif	Arah, koordinasi, kapasitas, informasi, akuntabel, dan efisien dari Gerakan Sedekah Sampah Kampung Brajan.

Environmental Governance	Berkeadilan	Gerakan Sedekah Sampah Kampung Brajan Dalam pengambilan keputusan melibatkan secara pengakuan, partisipasi, dan adil.
	Responsif	Tata kelola yang dilakukan oleh Gerakan Sedekah Sampah Kampung Brajan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial.
	Kuat	Gerakan Sedekah Sampah Kampung Brajan dapat bertahan dari waktu ke waktu, dapat mempertahankan kinerja, dapat mengatasi gangguan atau krisis.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif dengan fokus penelitian mengetahui Gerakan Sedekah Sampah sebagai upaya untuk mengatasi persoalan sampah di Dusun Brajan, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Dikarenakan penelitian ini berkaitan dengan baik/buruknya suatu komunitas maka dirasa lebih tepat menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif merupakan sebuah upaya untuk melakukan rasionalisasi/penafsiran terhadap realitas kehidupan berdasarkan apa yang dipahami oleh peneliti (Denzin & Lincoln, 2011:3-4).

Penelitian ini akan menggunakan sistem wawancara. Kemudian sumber data dari narasumber yang dipilih melalui proses klasifikasi dan reduksi data, kemudian proses pengolahan data dan yang terakhir proses analisis dan atau perumusan hasil penelitian dan penarikan kesimpulan. Pendekatan yang digunakan peneliti berupa deskriptif dimana seluruh data dan proses analisis akan menjelaskan *Civil Society* Gerakan Sedekah Sampah sebagai inovasi dalam *Environmental Governance*.

1.9.2 Unit Analisa

Unit analisa adalah objek yang akan diteliti dengan menyesuaikan pada pokok permasalahan yang ditentukan oleh peneliti. Penelitian ini mengambil unit analisa dari Relawan Gerakan Sedekah Sampah Kampung Brajan, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.

1.9.3 Data dan Sumber Data

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber asli (Pramiyati, 2017). Penelitian ini menggunakan data primer dimana semua informasi yang berkaitan dengan konsep penelitian yang diperoleh secara langsung dari unit analisa yaitu Relawan Gerakan Sedekah Sampah Kampung Brajan, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.

Tabel 1. 3 Data Primer

No	Data Primer	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Upaya Gerakan Sedekah Sampah Kampung Brajan dalam Tujuan Environmental Governance	Ananto Isworo (Founder Gerakan Sedekah Sampah Kampung Brajan)	Wawancara
2	Upaya Gerakan Sedekah Sampah Kampung Brajan dalam Tujuan Environmental Governance (dilihat dari praktik di lapangan)	Zahda Fikri (Relawan Gerakan Sedekah Sampah Kampung Brajan)	Wawancara
3	Dampak yang dirasakan oleh masyarakat oleh adanya Gerakan	Masyarakat diwakili oleh Ketua RT 01, dan RT 02	Wawancara

	Sedekah Sampah Kampung Brajan		
4	Upaya Gerakan Sedekah Sampah Kampung Brajan dalam Tujuan Environmental Governance	Peneliti sebagai Relawan Gerakan Sedekah Sampah	Observasi

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya melalui orang atau melalui dokumen atau arsip.

Tabel 1. 4 Data Sekunder

No	Data Sekunder	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Alur dan aktifitas pengelolaan sampah pada Buku Profil Gerakan Shadaqah Sampah	Buku Profil dan Media Sosial Gerakan Shadaqah Sampah	Studi Dokumentasi

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses yang penting dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah memperoleh data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber mengenai konsep penelitian. Untuk mengamankan informasi dan memudahkan dalam menganalisis jawaban dari narasumber, peneliti menggunakan alat tambahan berupa *smartphone* atau kamera atas izin dari narasumber. Untuk mendapatkan jawaban yang akurat dan efektif, peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai topik penelitian dan tujuan penelitian. Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada Founder dan Program Manager Gerakan Shadaqah Sampah Kampung Brajan, dengan alasan seorang founder dan program manager mempunyai pemahaman terkait sejarah pembentukan, visi, dan tujuan dari komunitas. Relawan Gerakan Shadaqah Sampah untuk mengukur tingkat keberhasilan dari kegiatan komunitas. Masyarakat Kampung Brajan yang diwakili oleh Ketua RT 01 dan Ketua RT 02 untuk mengetahui dampak dengan adanya Gerakan Sedekah Sampah.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen terdahulu. Studi dokumentasi digunakan karena data dalam dokumen dapat diulas Kembali sehingga memudahkan peneliti untuk mengetahui data terdahulu. Studi dokumentasi juga dapat disebut dengan pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri historis. Dalam penelitian ini studi dokumentas diperoleh dari Media Sosial, Buku Profil, dan dokumen yang berasal dari Founder Gerakan Sedekah Sampah Kampung Brajan.

3. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian untuk lebih mengetahui secara dekat kegiatan yang dilakukan. Dalam penelitian ini observasi dimasukkan dalam teknik pengumpulan data dikarenakan peneliti terlibat sebagai Relawan Gerakan Sedekah Sampah. Data observasi yang terkumpul didasarkan pada keterlibatan peneliti selama menjadi Relawan Gerakan Sedekah Sampah. Observasi dilaksanakan pada bulan Mei dan Juni.

1.9.5 Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengumpulkan data dari seluruh responden. Kegiatan dalam analisis data merupakan yaitu mengelompokkan data berdasarkan dengan variable dan jenis responden, mentabulasi data dari seluruh narasumber, menyajikan data dari setiap variable, kemudian dilakukan penghitungan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian kualitatif adalah:

1. Pengumpulan Data

Penelitian data dilakukan dengan menentukan subjek dan membuat panduan pertanyaan untuk narasumber sebelum melakukan wawancara.

2. Reduksi Data

Pada tahap reduksi, peneliti melakukan reduksi semua informasi yang diperoleh untuk memfokuskan pada masalah tertentu (Sugiarto 2017:5).

3. Penyajian Data

Penyajian data pada penelitian kualitatif menggunakan teks yang bersifat naratif. Penyajian data dilakukan setelah penulis mereduksi data.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan terakhir dalam analisis data. Kesimpulan diperoleh pada saat peneliti telah melakukan analisis data kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah.